

Praktik Botoh pada demokrasi lokal: Studi pada pemilihan Bupati Lamongan 2020

Ana Dewi Lanjar Diwuk Susilowati^{1*}, Hari Fitrianto²

^{1,2}Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

*E-mail: ana.dewi.lanjar-2019@fisip.unair.ac.id

Abstract: This study examines the practice of botoh in the 2020 Lamongan regent election. The phenomenon of vote buying and the high potential for money politics in a region have triggered various practices of money politics in local elections. This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews, with both primary and secondary data types. The aim of this study is to understand the practice and patterns of botoh in the 2020 Lamongan election and to determine how botoh influences voter preferences. The results indicate that the practice and working patterns of botoh in the 2020 Lamongan election were conducted in two ways. First, purely for material gain, involving bets among botoh practitioners. Second, as part of a candidate's campaign team, with a more systematic working mechanism. Botoh significantly influenced voter preferences in the 2020 Lamongan election, particularly in the southern region. The population in this area, classified as 'Abangan' and accustomed to the culture of money politics, was easily influenced by botoh practices.

Keywords: Botoh, Lamongan election, voter preferences, vote buying.

PENDAHULUAN

Realisasi kedaulatan rakyat dengan terwujudnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung di tahun 2005 merupakan salah satu bentuk dari peningkatan derajat demokratisasi di Indonesia. Pada Pilkada Langsung rakyat menempati posisi terhormat yaitu sebagai pemilik kedaulatan. Di situ pula prinsip dari demokrasi yaitu bahwa kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat melekat. Namun realitas yang terjadi kita justru disuguhkan pada perilaku-perilaku dari beberapa pihak yang bertentangan dengan demokrasi. Kandidat yang berkompetisi pada Pilkada berupaya memperoleh kemenangan melalui berbagai macam cara dari kampanye hingga cara yang seharusnya tidak dilakukan yaitu politik uang. Realisasi pelaksanaan Pilkada langsung di tahun 2005 dan Pilkada serentak mulai tahun 2015 hingga 2020 saat itu awalnya adalah upaya untuk mengefisiensi anggaran pemilu. Akan tetapi, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Pilkada langsung serentak saat ini merupakan ajang kompetisi dan kontestasi sumber daya ekonomi yang dimiliki kandidat calon maupun pendukung kandidat calon. Hal ini terjadi sebab para pendukung calon, kandidat calon perlu melakukan kampanye juga membeli dukungan dari masyarakat, yang mana hal tersebut memerlukan dana yang cukup besar. Aroma permainan politik uang pun tidak dapat dihindarkan, bahkan hal ini menjadi suatu hal yang lumrah dalam proses demokrasi lokal.

Kehadiran botoh dalam Pilkada pun sudah tidak lagi menjadi suatu hal yang tabu untuk diperbincangkan. Kemunculannya dalam Pilkada langsung tampaknya memberikan peranan yang



cukup signifikan dalam kemenangan kandidat calon. Sepak terjangnya dalam melakukan permainan judi menjadi salah satu faktor pendukung dari kemenangan kandidat calon, meskipun tujuan utama dari seorang botoh tetaplah permainan judinya. Botoh dalam konteks Pilkada tentu sangat merusak hakikat prinsip demokrasi. Perannya dalam demokrasi lokal adalah dengan taruhan uang, yang mana hal tersebut adalah prioritas utama mereka. Selain uang dalam demokrasi transaksional ini hal lain yang mendukung peran mereka adalah perekrutan orang-orang yang tepat pada daerah yang sedang melangsungkan Pilkada. Perekrutan yang tepat ini bertujuan untuk mempengaruhi pemilih, sebab suara pemilih di sini sangat menentukan kemenangan kandidat calon.

Botoh dapat berperan sebagai sukarelawan dalam tim kemenangan kandidat calon dan mempertaruhkan dirinya atas kemenangan tersebut. Dalam memainkan peran dan strateginya, botoh dapat mencampurkan politik nasional (demokrasi) dengan politik lokal sebagai basis botoh dalam memperoleh dukungan suara dari pemilih. Untuk itu botoh memanfaatkan agama, adat dan budaya lokal setempat, maka pemberian berupa materiil dan non-materiil sebagai perekat relasi antara botoh dengan kandidat atau botoh dengan pemilih sudah dianggap sebagai hal yang wajar. Strategi yang dilakukan botoh pada Pilkada juga cukup beragam. Untuk mendapatkan dukungan dari pemilih botoh dapat membeli suara dari pemilih dengan praktik politik uang.

Selain politik uang, adanya pesona budaya politik lokal yang dapat memperkuat basis budaya demokrasi lokal juga dimanfaatkan oleh botoh sebagai strategi dalam pemenangan kandidat calon, di mana pemenangan demokrasi lokal seperti Pilkada dapat bermuara dalam tradisi yang sebelumnya sudah menjadi sistem nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat (Kumolo, 2015). Dalam hal ini botoh berperan sebagai orang ketiga atau perantara, perantara ini juga disebut dengan sebutan lain yaitu broker atau *middleman*. Di Indonesia pun mayoritas broker politik bekerja dan melakukan perannya melalui jaringan informal bukan melalui partai politik (Aspinall & Berenschot, 2019).

Pilkada Lamongan tahun 2020 dilaksanakan secara langsung dan disuguhkan dengan kerawanan Kabupaten Lamongan terhadap praktik politik uang yang didasarkan pada pelaksanaan pemilu tahun sebelumnya. Rawannya Kabupaten Lamongan terhadap praktik politik uang dibuktikan juga dari catatan potensi politik uang (*money politics*) pada kontestasi pemilu 2019, di mana hasil Identifikasi Potensi Politik Uang (IPPU) di Kabupaten Lamongan menyebutkan persentase potensi politik uang di Lamongan mencapai angka 73 persen (Dikutip dari Harian Bhirawa dari Bawaslu Lamongan), persentase tersebut menjadi salah satu bukti bahwa pelaksanaan demokrasi elektorat di Kabupaten Lamongan sangat rawan dengan politik uang.

Alih-alih melaporkan tindakan tersebut, mayoritas masyarakat Lamongan (pemilih) justru lebih memilih untuk menerima imbalan baik berupa barang ataupun uang dari seseorang. Semakin maraknya praktik tersebut juga disebabkan oleh kultur masyarakat Lamongan terkhusus di beberapa daerahnya

yang mayoritas warganya adalah golongan masyarakat abangan ini, masih sangat menyukai praktik politik uang. Kerawanan dan faktor kultur masyarakat tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mengambil keuntungan materiil dari ajang pemilihan kepala daerah Lamongan.

Botoh uang politik ketika kontestasi politik lokal dilangsungkan pun tidak bisa dihindarkan, hal ini kemudian membuat para kandidat calon bupati dan wakilnya memutar balik strategi mereka dalam memikat simpati masyarakat. Jual beli suara (*vote buying*) kemudian dimainkan dan dipilih sebagai salah satu cara untuk memenangkan kontestasi politik. Sehingga tak jarang pada saat kampanye para calon sampai pada tahapan memberikan barang hingga fasilitas kepada para pemilih. Maraknya jual beli suara (*vote buying*) di setiap ajang Pilkada memunculkan pandangan abstrak terkait efektivitas dari keterlibatan pihak-pihak yang mampu mempengaruhi preferensi pemilih, juga kemenangan Pilkada/Pemilu dengan jual beli suara (*vote buying*) khususnya pada praktik botoh yang banyak dilakukan di wilayah Jawa salah satunya juga di Lamongan.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga menyebutkan bahwa pengaruh politik uang terhadap preferensi pemilih masih samar, memicu munculnya kajian lainnya terkait pembelian suara (*vote buying*) dengan salah satu praktiknya menggunakan jaringan kelompok (botoh). Salah satunya yaitu kajian mengenai cara kerja botoh pada Pilkada Tulungagung 2018, dalam penelitian tersebut disampaikan para botoh hanya bekerja untuk nama-nama calon kandidat yang telah masuk ke dalam bursa taruhan, dalam hal ini botoh melakukan taruhan sesama botoh.

Keterlibatan botoh di setiap Pilkada juga disebabkan oleh tingginya permintaan saat ini, yaitu ketergantungan kandidat kepada perantara politik juga anggapan dari kandidat calon bahwa politik transaksional memerlukan tim penyaluran secara langsung dan efektif sehingga jasa botoh diperlukan dalam hal ini. Melihat hal tersebut nampaknya kajian secara mendalam mengenai praktik botoh pada ajang Pilkada atau pemilihan bupati sangat diperlukan. Mengingat cara kerja dan strategi yang mereka gunakan untuk mempengaruhi pemilih saat Pilkada berlangsung tergolong sangat berhasil, meskipun tidak mencapai pada angka seratus persen. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana perpolitikan botoh pada Pilkada Lamongan 2020?
2. Apakah praktik botoh berdampak pada preferensi pemilih dan mengganggu hakikat prinsip demokrasi pada Pilkada Lamongan 2020?

KERANGKA KONSEPTUAL

Botoh

Botoh adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang berjudi. Awalnya botoh ini terjadi di pemilihan kepala desa khususnya di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Darry & Permana (2019) menyebutkan botoh adalah orang-orang yang mempertaruhkan peluang dalam pemilihan kepala

daerah, dalam hal ini orang-orang tersebut memiliki niat dan minat untuk memenangkan salah satu kandidat calon yang mereka dukung dengan menggunakan segala macam strategi yang ada. Dalam konteks politik lokal, botoh merupakan seorang relawan yang memberikan dukungan kepada kandidat calon secara sukarela. Orang-orang yang tergabung dalam botoh biasanya adalah orang-orang yang memiliki banyak pengalaman tentang pemilihan kepala daerah sebelumnya. Kehadiran botoh dalam Pilkada ada yang secara sukarela dan ada juga yang diminta oleh kandidat calon kepala daerah. Dalam ruang geraknya, botoh terbagi menjadi dua ruang gerak yaitu: (1) botoh yang bergerak sendiri (individu), botoh seperti ini biasanya melakukan strategi pemenangan secara individual dengan cara beradaptasi dengan kondisi masyarakat setempat; (2) botoh yang bergerak dalam tim pemenangan (tim sukses), botoh dalam jenis ini merupakan botoh yang sudah terorganisir dan merupakan gabungan dari botoh-botoh lainnya.

Cara kerja botoh pun dapat melalui dua strategi yang mereka gunakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Schroder (dalam Kumolo, 2015), yaitu defensif (mempertahankan) dan ofensif (mendapatkan). Kemudian untuk pola kerjanya, botoh terbagi dalam beberapa macam di antaranya: (1) botoh yang masuk dalam tim sukses kandidat calon; (2) botoh yang sejak awal dipilih dan didatangi oleh kandidat calon (penasihat); dan (3) botoh yang bertaruh langsung dengan kandidat calon (Hartati et al., 2019). Selain memanfaatkan kelompok jaringannya, untuk memenangkan kandidat yang didukung sering kali botoh menggunakan strategi *money politics* dengan menggunakan uang pribadi mereka. Tujuannya adalah agar basis suara tidak jatuh ke kandidat lawan dan memperoleh banyak dukungan dari masyarakat, oleh karena itu perekrutan orang-orang yang tepat sangat mempengaruhi hasil akhir dari kerja botoh tersebut.

Demokrasi Lokal

Memahami demokrasi lokal di Indonesia tentu tidak terlepas dari adanya kebijakan desentralisasi. Kebijakan desentralisasi adalah gerbang awal dari terciptanya demokrasi lokal. Bahkan beberapa ilmuwan pun meyakini bahwasanya tujuan dari adanya desentralisasi adalah untuk menumbuhkan demokrasi lokal (Smith, 2023). Dalam konteks ini, bentuk kebijakan penting dalam desentralisasi yang sangat berpengaruh pada kelangsungan demokrasi lokal adalah devolusi, yaitu adanya transfer kewenangan, kekuasaan, sumber daya dan tanggung jawab dari negara ke pemerintah lokal.

Devolusi ini juga disebut sebagai desentralisasi demokratis, yang mana dalam hal ini (Manor, 1997) menyebutkan bahwasanya desentralisasi demokratis ini memiliki kehendak atas pengelolaan kekuasaan dengan tujuan pengembangan dan pengimplementasian kebijakan, perluasan proses demokrasi pada tingkat pemerintahan lokal hingga pengembangan pada standarisasi (ukuran) yang menjamin bahwa pelaksanaan demokrasi berlangsung secara berkelanjutan. Kemudian pembentukan pemerintahan regional yang selanjutnya memperoleh kekuasaan otonom yang signifikan dan memperoleh kontrol atas

sumber daya di wilayahnya, menghasilkan suatu tipe perpolitikan yang secara ideologis lebih moderat, tidak terlalu terpolarisasi, pragmatis, toleran, dan lebih fleksibel.

Organisasi non-pemerintah global yaitu International IDEA merupakan salah satu organisasi yang mengkaji terkait demokrasi lokal secara lebih detail. Di mana dalam hal ini International IDEA memberikan penekanan pada beberapa konsepsi penting mengenai demokrasi lokal di antaranya sebagai berikut; Pertama, kewarganegaraan dan masyarakat, kewarganegaraan peran serta masyarakat lokal merupakan fondasi utama yang sesungguhnya. Sebab, segala proses pengambilan keputusan dan terbentuknya lembaga-lembaga masyarakat yang ada tidak terlepas dari praktik demokrasi langsung, di mana suara individu dapat didengar dengan lebih mudah ; Kedua, pendidikan politik. salah satu fasilitas yang akan didapati dari demokrasi lokal adalah pendidikan politik.

Ketiga, musyawarah. Demokrasi bukan semata-mata hanya berarti pemilu. Dalam demokrasi terkandung unsur-unsur penting lainnya seperti debat, dialog, dan diskusi yang dimaknai sebagai pemecahan solusi bagi setiap masalah yang timbul di masyarakat. Keempat, kesejahteraan sosial dan pemerintah yang baik. Para pendukung paham demokrasi partisipatoris di tingkat lokal dan John Stuart Mill menyatakan bahwa membuka keran bagi kecerdasan masyarakat dan kebijakan akan mendukung terciptanya kesejahteraan sosial dan pemerintahan yang baik. Maknanya, demokrasi yang tercipta akan cenderung meningkatkan hubungan yang baik antar warga, masyarakat memiliki semangat sosial yang tinggi , dan membangun masyarakat yang mandiri (Sisk et al., 2002).

Filsafat demokrasi yang paling mendasar dipopulerkan oleh 'Abraham Lincoln' mendefinisikan demokrasi yang tak lain adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Definisi demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tersebut apabila diletakkan dalam sistem politik Easton maka dapat dikategorikan sebagai input, proses, dan output. Input dalam implementasinya melahirkan konsep partisipasi. Partisipasi merupakan hubungan ekonomi-politik atau persoalan hubungan kekuasaan yang dianjurkan dalam demokrasi. Dalam konteks ini, masyarakat ditempatkan sebagaimana mestinya posisi mereka sebagai masyarakat. Pertama, masyarakat adalah *citizen* bukan sebagai *client* (budak). Di mana sebagai *citizen*, masyarakat memiliki hak penuh untuk memiliki dan setiap individu dalam masyarakat adalah pribadi yang utuh. Kedua, masyarakat merupakan mitra (*partner*) bukan individu dengan kedudukannya diperintah. Ketiga, masyarakat bukan sekedar objek pasif yang menerima manfaat dari kebijakan pemerintah, dan yang keempat partisipasinya bukan pemberian pemerintah melainkan hak dari warga masyarakat itu sendiri.

Keempat hal tersebut yang menjelaskan alasan diselenggarakannya Pilkada secara menyeluruh dan merata di wilayah Indonesia. Kesadaran demokratis menempatkan partisipasi masyarakat pada kedudukan yang seharusnya dalam proses pemilihan pemimpin. Pilkada sendiri banyak melahirkan pemimpin baru yang memiliki serangkaian janji program yang nantinya apabila mereka terpilih

program tersebut akan dijalankan dalam kebijakan publik dengan sasaran untuk menyejahterakan rakyat. Namun ternyata kualitas demokrasi lokal sangat bergantung pada responsivitas masyarakat. Sebab hal ini menggambarkan keberhasilan pemimpin terpilih dalam kepemimpinan lokalnya yang responsif terhadap aspirasi rakyatnya.

Pelaksanaan Pilkada langsung sesungguhnya adalah bentuk tindak lanjut dari realisasi prinsip-prinsip demokrasi yang secara normatif menjamin prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hal politik (Pratikno, 2005). Adapun empat alasan mengapa Pilkada langsung perlu dilaksanakan untuk menggantikan Pilkada tidak langsung. Maswadi (2005) menyebutkan yang pertama menumbuhkan kepemimpinan lokal; kedua, untuk membangun daerah; ketiga, proses legitimasi rakyat yang kuat; dan yang keempat adalah untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan transparansi pemerintah. Sesuai dengan asas pemilu, Pilkada langsung yang diselenggarakan seharusnya berjalan sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Tercapainya Pilkada dengan asas-asas pemilu tersebut akan berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat dikarenakan legitimasi rakyatnya yang kuat dan transparansi pemerintahan serta akuntabilitas publik akan meningkat. Akan tetapi realitas di lapangan justru berbanding terbalik. Di mana adanya suatu mekanisme dan sistem diperbaiki, sanksi dan ancaman diperketat ataupun diperberat, juga semakin diperkuatnya lembaga pengawas pemilu justru pelanggaran-pelanggaran pemilu semakin banyak dilakukan. Salah satunya yaitu bentuk malapraktik pemilu yang dapat merusak citra demokrasi lokal yang demokratis yaitu jual beli suara.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Praktik Botoh pada Pemilihan Bupati Lamongan 2020” menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses ungkapan makna atas tindakan atau perbuatan yang sebelumnya telah diukur (Aminah, 2019). Metode yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Praktik Botoh pada Pemilihan Bupati Lamongan 2020” adalah deskriptif-kualitatif. Snowball adalah teknik yang digunakan dalam menentukan informan. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dari pengumpulan data dengan wawancara mendalam (*indepth-interview*) dengan para informan yang sebelumnya ditentukan dengan teknik *snowball*, yang kemudian menghasilkan beberapa pihak yang perlu diwawancarai dalam peristiwa ini. Selain data primer yang didapatkan melalui hasil wawancara, penelitian ini juga didukung oleh data primer dari jurnal dan dokumen publikasi maupun tidak dipublikasi lainnya. Setelah data primer dan data sekunder didapatkan dan dikumpulkan, langkah selanjutnya yang ditempuh adalah kategorisasi.

Kategorisasi diperlukan untuk memilah data-data yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Karena sesuai dengan prosedur penelitian utama dalam penelitian kualitatif adalah pengelolaan data, sehingga analisa data tidak harus ketika data terkumpul (Hendarso dalam Suyanto, 2005)). Selanjutnya, setelah

proses kategorisasi data selesai dilakukan. Tahapan selanjutnya yang perlu ditempuh oleh peneliti adalah tahap penyajian data. Penyajian data ini berisikan data-data yang sudah direduksi, yang kemudian disajikan dalam bentuk naratif karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tahapan terakhir dalam analisa data adalah penarikan kesimpulan penelitian. Pada tahapan ini, peneliti berusaha untuk mencari makna yang terkandung dalam setiap data-data yang telah disajikan, sehingga kesimpulan yang ditarik adalah kesimpulan secara holistik.

Lamongan dipilih sebagai lokasi penelitian atas dasar hasil analisa peneliti terhadap penelitian, di mana dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 khususnya di wilayah Lamongan banyak pelanggaran pemilu salah satunya praktik botoh. Melalui praktik tersebut kandidat calon, aktor politik, hingga masyarakat biasa ikut terlibat di dalamnya. Keterlibatan banyak pihak dalam praktik botoh ini kemudian membentuk sebuah hubungan yang masuk akal dan menguntungkan dari segi materiil dan ekonomi.

PEMBAHASAN

Perpolitikan Botoh pada Pilkada Lamongan 2020

1. Tipologi Botoh pada Pilkada Lamongan 2020

Dalam penelitian sebelumnya disebutkan, terdapat botoh yang sejak awal yang didatangi oleh kandidat calon. Biasanya kandidat calon yang mendatangi botoh sejak awal pemilihan ini memiliki tujuan untuk berkonsultasi terkait pencalonan dirinya pada Pemilukada. Seperti yang diungkapkan oleh (Kumolo, 2015), botoh dimaknai sebagai penasihat calon untuk dapat memenangkan pemilihan. Botoh seperti ini biasanya tergolong sebagai botoh papan atas, dikarenakan bertaruh langsung dengan kandidat calon. Selain itu, ada pun botoh yang masuk ke dalam tim sukses para kandidat. Karena dari awal tujuan botoh adalah keuntungan material, maka dalam memperbesar kemungkinan mereka untuk memperoleh keuntungan botoh menggelar perjudian secara horizontal.

Maksud dari perjudian horizontal adalah perjudian yang dilakukan antara botoh dengan sesama botoh lainnya, atau antara penjudi dengan penjudi lainnya. botoh yang melakukan perjudian antar sesama botoh ini juga tergolong sebagai botoh murni. Yang mana botoh ini bermain judi dengan cara memasang angka nominal dalam satuan rupiah tertentu. Angka nominal tersebut nantinya ditujukan untuk kandidat calon yang ia dukung. Botoh murni memiliki lawan yang juga dari seorang botoh. Pada Pilkada Lamongan 2020 botoh yang awalnya murni sebagai perjudian antar sesama botoh maupun antar botoh dengan kandidat. Saat ini sudah mulai berkembang, yaitu sudah mulai masuk dalam ranah politik. dalam ranah politik ini botoh akan membentuk jaringan-jaringan kelompok. Saat masuk dalam ranah politik botoh akan memosisikan dirinya sebagai perantara atau pihak ketiga yaitu broker politik (*middleman*).

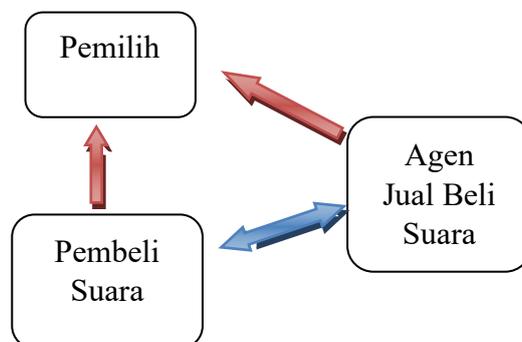
Dalam praktiknya sebagai perantara, botoh ini kemudian diilustrasikan oleh Schaffer dan Schedler, yang mana terjalin hubungan antara kandidat dengan botoh sebagai hubungan ekonomi yang sederhana. Botoh di sini merupakan agen jual beli suara yang membeli suara dari penjual suara (pemilih), dan kandidat disini sebagai pembeli suara yang membeli suara melalui agen tadi. Sehingga dalam hal ini botoh yang ada pada Pilkada Lamongan tergolong ke dalam dua kategori yaitu botoh murni (botoh yang melakukan perjudian antar sesama penjudi), dan botoh yang masuk ke dalam ranah politik yaitu menjadi tim sukses atau tim kemenangan dari kandidat calon.

3. Praktik Botoh pada Pilkada Lamongan 2020

Pada Pilkada Lamongan 2020 botoh melakukan aksinya dengan menggelar perjudian secara horizontal. Perjudian horizontal adalah perjudian yang dilakukan antara botoh dengan sesama botoh lainnya, atau antara penjudi dengan penjudi lainnya. Mereka taruhan dengan jumlah nominal angka yang telah mereka sepakati. Kemudian untuk tempat mereka melakukan taruhan atau perjudian adalah bertempat di warung kopi. Mempertimbangkan kearifan lokal (*local wisdom*) budaya Jawa juga budaya lokal daerah Lamongan dirasa warung kopi adalah tempat yang cukup tepat untuk melakukan hal tersebut.

“orang-orang itu justru secara terang-terangan ketika mencari musuh botoh (musuh untuk berjudi/taruhan), aku kemarin jadi saksi saat Pilkada di daerah S. Kemarin itu di daerah S juga secara terang-terangan botoh melakukan aksinya di warung” (keterangan Ansori, dalam wawancara 24 Januari 2023).

Botoh tidak hanya melakukan perjudian antara sesama pebotoh. Dalam praktiknya botoh juga merambah pada ranah politik, salah satunya adalah menjalankan praktik mereka dengan bergabung ke dalam jaringan kelompok. Saat berada pada jaringan kelompok ini, botoh akan memosisikan dirinya sebagai perantara atau pihak ketiga dengan sebutan broker politik atau perantara (*middleman*). Posisi botoh dengan kandidat calon juga dipilih oleh Schaffer & Schedler (dalam Hartati et al., 2019), diilustrasikan sebagai hubungan ekonomi yang sederhana, di mana botoh merupakan agen jual beli suara yang membeli suara dari penjual suara (pemilih). Sehingga didapati ilustrasi hubungan antara pebotoh, pemilih, dan kandidat sebagai berikut:



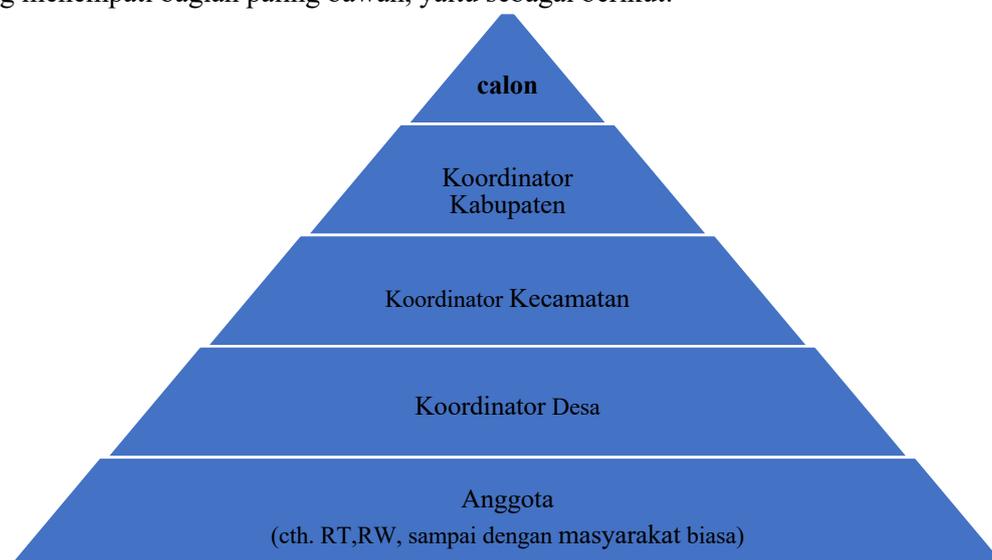
Gambar 1. Ilustrasi hubungan antara pebotoh, pemilih, dan kandidat

Keterangan :

- Tanda panah berwarna merah artinya membeli suara
- Tanda panah *left-right* berwarna biru artinya dapat melakukan penjualan dan pembelian suara

Praktik botoh dalam ranah politik dapat terlihat lebih terstruktur dan sistematis lagi. Dibandingkan

dengan gambaran sebelumnya, botoh akan memperlihatkan mekanisme kerjanya melalui tim sukses ketika Pemilu akan dilaksanakan. Sebagai broker politik dan organisasi perantara dalam pemungutan suara tim sukses ini memiliki struktur anggota yang bervariasi. Akan tetapi, mayoritas bentuk struktur tim sukses ini berbentuk piramida di mana ada yang menempati puncak tertinggi dan ada yang menempati bagian paling bawah, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Piramida Tim Sukses

Keterangan: Bagian koordinator kecamatan adalah letak posisi botoh

Para botoh yang bergabung dalam kelompok jaringan mereka (timses) ini menjalankan fungsi awal mereka. Mereka akan berperan sebagai calo, di mana Aspinall et al., (2017) menyebutkan dalam penelitiannya fungsi awal dari para calo (sebutan lain dari para broker politik) ini adalah untuk mengidentifikasi masyarakat yang bersedia untuk memilih kandidat calon. Sesuai dengan arahan koordinator masing-masing koordinator desa dan anggota yang merupakan dua lapisan terbawah dalam piramidal struktur jaringan tim sukses mulai merekrut calon-calon pemilih.

4. Metode Botoh pada Pilkada Lamongan 2020

Botoh yang tergabung dalam jaringan broker (perantara politik) menggunakan metode survei untuk memperoleh suara pemilih. Survei ini dilakukan untuk mengetahui masyarakat nantinya akan memilih kandidat yang mana dalam Pilkada Lamongan. Setelah melakukan survei tersebut koordinator desa akan mendapatkan data kependudukan dari koordinator kecamatan. Data kependudukan dari koordinator kecamatan ini merupakan data awal. Data awal yang diperoleh akan diteruskan oleh koordinator desa ke anggotanya yaitu RT. Rukun Tetangga (RT) akan menjalankan tugas pertamanya yaitu untuk mengunjungi setiap warga sesuai dengan data yang diperoleh di awal.

Hal ini masih berhubungan dengan survei pertama yaitu untuk mengetahui siapa saja masyarakat yang memilih kandidat calon. Misalnya, anggota jaringan broker ini merupakan pendukung dari pasangan calon nomor 2, maka sasarannya adalah masyarakat yang mendukung calon nomor 2. Setelah data

warga atau pemilih ini didapatkan tugas selanjutnya merupakan tugas koordinator desa untuk mengirim data tersebut ke pusat (koordinator kabupaten). Informan kali ini menyebutkan bahwa ada aplikasi khusus untuk tim sukses pada waktu itu, dan kegunaan aplikasi tersebut adalah untuk mengirim data-data pemilih yang sudah dikumpulkan sebelumnya.

5. Variasi Jumlah Pemilih Yang Direkrut Botoh dan Variasi Jumlah Uang Yang Diberikan Botoh pada Masyarakat

Variasi jumlah orang yang di rekrut broker pun cukup bervariasi, paling sedikit satu orang broker merekrut 10 orang dan paling banyak 100 hingga 120 orang. Jumlah ini tergantung target juga kapasitas dari masing-masing broker. Besaran nominal uang pun ditentukan dari banyaknya jumlah survei data yang didapat di awal. Misalnya, data yang didapat dari satu wilayah contoh desa ada 100 orang. Kemudian setiap orang suaranya dibeli dengan harga 50.000 rupiah. Besaran nominal uang tersebut didapatkan dan disepakati berdasarkan dari hasil survei di lapangan. Misalnya, kubu satu memberikan uang sebesar 50.000 rupiah, koordinator yang berada di lapangan pastinya akan melihat kubu satu tersebut. Setelahnya, orang yang berada di lapangan ini akan memberikan laporan kepada pusat terkait besaran tersebut.

Mayoritas mereka akan menyeimbangkan jumlah nominal yang dikeluarkan sama dengan kubu sebelah. Namun, tidak menutup kemungkinan jikalau mereka menginginkan suara lebih banyak dari kubu sebelah, maka nominal tersebut akan dinaikkan jumlahnya, dan tentunya lebih besar dari kubu sebelah. Setelah menentukan jumlah besaran nominal, jumlah nominal tersebut akan dikalikan 100 (jika datanya 100). Maka, dari perkalian tersebut didapatkan hasil sebesar 5 juta rupiah/ desa. Kabupaten Lamongan sendiri terdiri dari 474 desa/kelurahan jika satu desa kandidat mengeluarkan uang sebesar 5 juta rupiah maka untuk 474 desa satu kandidat calon bisa menghabiskan uang sebesar 2 milyar lebih untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Namun, nominal ini hanya perkiraan saja mengingat Pilkada merupakan ajang besar dalam pemilu daerah jumlah tersebut dapat dipastikan bertambah lebih besar lagi untuk kepentingan kampanye dan lain-lain.

6. Arah Gerak Botoh pada Pilkada Lamongan 2020

Arah gerak botoh sebagai broker politik sendiri terbagi menjadi dua yaitu individu dan yang bergerak dalam tim sukses. Dari penjelasan-penjelasan di atas, untuk broker yang ada di kabupaten Lamongan arah geraknya mencakup dua-duanya yaitu individu dan bergerak dalam tim sukses. Namun, hanya sedikit yang bergerak secara sendiri mengingat Pilkada merupakan ajang pemilihan daerah yang besar sehingga perlu modal yang besar juga untuk mempengaruhi para pemilih. Dan dalam hal ini yang bergerak sendiri adalah kader partai dan pengusaha. Kemudian, untuk broker yang bergerak dalam tim sukses sendiri cukup banyak. Bisa dipastikan mayoritas menggunakan arah gerak seperti ini.

8. Strategi Botoh pada Pilkada Lamongan 2020

Botoh melakukan politik transaksional sebagai strategi utamanya yaitu *money politics*. Bujukan material tidak hanya uang, rupanya para botoh ini juga melakukan strategi lain salah satunya yaitu dengan bagi-bagi sembako. Tujuan dari bagi-bagi sembako ini adalah untuk mengikat para pendukung yang setia mendukung kandidat calon. Selain itu juga untuk menarik perhatian dari masyarakat (pemilih) lainnya. Sembako yang dibagikan berupa beras atau kebutuhan pokok dibagikan per Kepala Keluarga (KK) satu.

“kemarin itu, sebelum ke politik uang kita pakai trik bagi-bagi sembako dulu” (kata informan). Kemudian informan juga menjelaskan “H-2 bulan biasanya itu udah mulai diberi bantuan dan lain-lain, politik uang sendiri dilakukan saat mendekati pemilu bisa seminggu sebelum menjelang hari H pemilu, lima hari sebelum atau paling lambat 3 hari sebelum hari H pemilu”. (keterangan Sofyan pada wawancara 22 Januari 2023).

Untuk mempertahankan basis suaranya botoh sebagai broker politik menggunakan cara main data. Main data ini merupakan salah strategi yang dilakukan agar orang-orang yang dipilih tidak pindah atau diambil oleh broker dari kubu lain. Main data ini bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan ancaman data pemilih dan pertukaran data antara tim sukses. Ancaman data yang dimaksud disini adalah mengancam para pemilih dengan senjata ancaman yaitu data diri mereka. Cara ini dilakukan para broker untuk mempertahankan para pemilih.

Strategi lainnya untuk mempertahankan basis suara adalah dengan memberikan penawaran uang yang lebih tinggi dari lawan mainnya. Misalnya, dari kubu calon nomor 1 setiap orang memperoleh uang 30.000 rupiah. Maka dari kubu calon nomor urut 2 harus berani pasang harga lebih tinggi dengan nominal 50.000 rupiah. Perbedaan nominal yang diberikan ini cukup berhasil mempengaruhi para penjual suara (pemilih). Karena disini mereka mengutamakan keuntungan material (uang) jadi dapat dipastikan mereka akan memilih nominal dari kubu yang penawarannya lebih tinggi.

Strategi lainnya yang dilakukan botoh untuk mendapatkan dukungan dari pemilih adalah dengan cara kearifan lokal. Salah satunya adalah komunikasi atau *nonggo* (orang Jawa menyebutnya). Pada Pilkada Lamongan, ada salah satu informan menyebutkan cara untuk mendapatkan suara dari pemilih yaitu dengan cara ‘Getok Tular’. Getok tular artinya adalah sarana menular atau menyampaikan informasi dari satu orang kepada orang lain secara sambung-menyambung. Kata lainnya yaitu dari mulut ke mulut. Cara ini dipilih oleh salah satu broker politik perempuan, dengan alasan sasarannya adalah ibu-ibu. Keterangan dari saudari P contoh kalimat getok tular:

“Aku ndue calon iki, sesok melu aku ya engko saman golek wong sakmene gae calonku”.
(Aku ada calon ini, besok ikut aku nanti kamu mencari beberapa orang untuk calonku).

Imbalan yang diharapkan dari pelaku getok tular ini bukan lagi materi berupa uang barang atau yang lainnya. Dikarenakan pelaku ini merupakan tenaga pendidik imbalan yang diharapkan adalah

pengeluaran Surat Keterangan (SK) untuk yayasan atau tempat mengajarnya dipermudah. Strategi berikutnya yang dilakukan para botoh untuk mendapatkan suara adalah menyerang daerah lawan atau kubu lawan. Serangan fajar dilakukan untuk mendapatkan suara dari pendukung kubu lawan. Dengan iming-iming nominal harga suara lebih tinggi, serangan fajar dilakukan untuk mendapatkan suara lebih banyak dan mengalahkan calon lainnya. serangan fajar sendiri biasanya dilakukan ketika hari H pelaksanaan Pilkada. Para pemilih akan dihadang oleh para broker politik ketika akan menuju TPS (Tempat Pemungutan Suara). Mereka diberi amplop berisi uang dan pesan untuk memilih pasangan ini. Di Pilkada Kabupaten Lamongan serangan fajar pun terjadi di beberapa wilayah, sehingga membuat pasangan calon nomor urut 2 di wilayah-wilayah tersebut. Dari salah satu tim sukses nomor urut 2 yaitu Muslik menyebutkan:

“kita sendiri kecolongan di beberapa wilayah ini, sehingga akhirnya pada hari H pemilihan kita salah suara. Dari kubu lawan yaitu pasangan calon nomor urut 1 ternyata melakukan serangan fajar tepat di hari H pelaksanaan pemilihan. Para warga yang akan pergi ke TPS di hadang, sehingga mau gak mau ya beberapa dari pemilih yang sebelumnya mendukung dan akan memilih calon nomor 2 teralihkan untuk memilih calon nomor urut 1”.

Kemudian terdapat strategi lainnya yang dilakukan para broker (botoh) ini untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat yaitu patronase. Hubungan patronase yang dilakukan para broker ini adalah memanfaatkan ketimpangan sumber daya, hubungannya mengarah pada hubungan pribadi dan tentunya saling menguntungkan. Misalnya hubungan kandidat dengan partai pengusungnya atau kader partai. Secara material (dana) kandidat memiliki lebih banyak modal daripada para pengusungnya. Selain kader partai tampaknya para pengusaha juga ikut andil dalam permainan botoh ini.

Dalam bertaruh, pengusaha ini cukup memiliki pengaruh yang besar didaerahnya karena memiliki sumber daya yang lebih tinggi daripada masyarakat umumnya. Informan menyebutkan salah satunya yaitu UD. B (nama samaran). UD. B menggelontorkan sejumlah nominal uang untuk membantu kandidat calon memperkuat basis suara yang dimilikinya. Kemudian sebagai gantinya ia mendapat proyek pemerintah, bukti nyatanya yaitu UD tersebut menjadi tender bantuan sosial.

“ya sekarang kita lihat tender bansos sekarang dipegang siapa, UD. B kan. Ya itu salah satu dampak kemenangan yang terasa langsung ke mereka yang sebelum e sudah disebutkan” (kata S pada wawancara 22 Januari 2023).

Botoh yang semula ramai di ajang Pilkadaes kini ikut merambah ke Pemilukada. Mereka semakin luas jaringannya dan terorganisir. Sebutan botoh mulai berkamufase menjadi broker (perantara politik) dengan cara kerjanya yang semakin sistematis dan terstruktur.

Dampak Botoh Terhadap Preferensi Pemilih

1. Dampak Praktik Botoh pada Masyarakat Abangan

Mengenai kultur masyarakat abangan yang mewajarkan politik uang membuat mereka terpengaruh akan memilih jika ada imbalan/sangu. Masyarakat sendiri sebenarnya tidak terlalu memikirkan keuntungan yang besar, asal waktu *nyoblos* mereka diberi imbalan mereka sudah senang dan mau memilih kandidat tersebut. Masyarakat atau pemilih yang sudah menerima uang dari kandidat calon, dapat dikatakan secara otomatis akan menjatuhkan pilihannya pada kandidat yang memberinya uang tersebut.

Akan tetapi, kinerja botoh sebagai broker politik yang mempengaruhi preferensi dari pemilih pada Pilkada Lamongan, tidak dapat dipresentasikan dalam angka 100 persen. Dikarenakan beberapa pemilih memberikan keterangannya bahwa mereka tidak terpengaruh akan politik uang yang dijalankan oleh botoh. Politik uang ada di daerah kami, tapi masyarakat memilih tidak terbuka terhadap hal tersebut. Masyarakat daerah kami memilih sesuai hak mereka, kandidat mana yang sekiranya pantas menjadi pemimpin. Kebanyakan daerah kami juga orang-orangnya pendidikannya sudah tinggi, jadi kebanyakan sudah sadar dan dominan menolak politik uang.

2. Dampak Praktik Botoh pada Masyarakat Santri

Nampaknya hal berbeda terjadi pada kalangan masyarakat santri di Kabupaten Lamongan. Jika kalangan masyarakat sebelumnya politik uang sangat dinormalisasikan, sehingga botoh dengan mudah dapat mempengaruhi pilihan masyarakat di kalangan tersebut. Pada kalangan santri yang bertempat tinggal di wilayah pesantren politik uang dapat dikatakan tidak memberikan pengaruh. Justru dalam lingkungan seperti ini yang paling berpengaruh adalah '*Dawuhe mbah kyai*'. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Saudari Kolipah:

"Kalau santri rata-rata mengikuti ucap mbah kyai (dawuhe mbah yai), soalnya mbah kyai biasanya sudah meneliti atas dasar calon tersebut mau membantu pondok setelah jadi atau semisal terpilih saat pemilihan tersebut. Jadi, bermanfaat untuk pondok juga untuk para santri" (wawancara 22 Januari 2023).

Fenomena tersebut sama dengan fenomena tuan guru dan pengaruhnya dalam dunia politik yaitu di Lombok, hegemoni politik dibungkus dengan simbol legitimasi agama serta budaya (Surbakti et al., 2014). Tuan guru membangun kekuasaannya tersebut melalui Pendidikan formal maupun informal, dan salah satunya adalah pondok pesantren. Posisi strategis yang dimiliki oleh tuan guru mampu membuatnya memiliki pengaruh yang cukup besar di masyarakat. *Sami'na wa'atho'na* atau kharismanya yang mampu mempengaruhi santri dan orang-orang di sekitarnya untuk taat dan patuh terhadap apa diucapnya.

Sama halnya dengan sebutan mengikuti '*dawuhe mbah yai*'. Untuk pemilihan kepala daerah Lamongan 2020 kemarin peran mbah yai sendiri cenderung sebagai penasihat sebab kandidat calon sama-sama

bagus. Selain mengikuti ‘*dawuhe mbah yai*’, masyarakat wilayah utara Lamongan juga ada yang menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Lamongan 2020, dengan mempertimbangkan latar belakang atau visi dan misi kandidat calon. Masyarakat yang seperti ini biasanya adalah masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi, dan menolak untuk menerima segala bentuk politik uang.

Akan tetapi, masyarakat di wilayah utara Lamongan tidak dapat dinyatakan bersih dari segala bentuk politik uang. Sebab fakta di lapangan ditemukan bahwasanya masih terdapat wilayah kecamatan di wilayah utara Lamongan seperti kecamatan Turi masih bisa menerima imbalan materi. Namun imbalan materi yang diterima bukan dari praktik botoh. Melainkan dalam bentuk politik uang (*money politics*). Dari hal ini pemilih pada wilayah utara Lamongan terbagi menjadi tiga yaitu pemilih yang menerima imbalan materi, pemilih yang memilih atas pertimbangan latar belakang kandidat calon, dan yang terakhir pemilih yang bergantung dengan tuan guru.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data pada penelitian ini, maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Praktik botoh terjadi pada Pilkada Lamongan dipicu oleh tingginya jual beli suara pada wilayah tersebut. karakteristik masyarakat di beberapa wilayah Lamongan yang menormalisasi akan jual beli suara juga memicu terjadinya praktik botoh di sela-sela pelaksanaan Pilkada. Alhasil pelaksanaan demokrasi lokal yang seharusnya sesuai dengan asas pemilu LUBER dan JURDIL tidak tercapai sebab adanya praktik botoh tersebut.
2. Praktik botoh pada Pilkada Lamongan 2020 dilakukan dengan perjudian horizontal yaitu perjudian yang dilakukan antara sesama pebotoh dan membentuk jaringan kelompok.
3. Melalui praktiknya pola botoh pada Pilkada Lamongan 2020 terbagi menjadi dua. Pertama, murni karena tujuan materiil. Yaitu botoh hanya melakukan taruhan dengan sesama botoh lainnya. Kedua, botoh jadi bagian mekanisme tim kemenangan kandidat calon. Dalam hal ini botoh biasanya membentuk jaringan kelompok dan bekerja secara sistematis menggunakan berbagai macam strategis salah satunya sebaran politik uang.
4. Botoh pada Pilkada Lamongan 2020 mampu mempengaruhi preferensi pemilih Lamongan. Khususnya pada bagian wilayah Lamongan selatan yang masyarakatnya tergolong masyarakat ‘Abangan’. Diantaranya seperti Kecamatan Sukorame, Modo, Ngimbang, Bluluk, Babat, Sugio dan Kedungpring. Geografis wilayah selatan yang cenderung pedesaan dan mayoritas penduduknya petani, hal ini kemudian berdampak pada pengetahuan politik uang masyarakat daerah tersebut sangat minim. Kultur masyarakatnya yang mewajarkan politik uang pun membuat mereka lebih mudah terpengaruh oleh imbalan /sangu yang diberikan saat Pilkada.

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka peneliti dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Praktik jual beli suara (*vote buying*) yang relatif cukup tinggi dan sering terjadi di setiap ajang Pilkada membuka peluang besar adanya praktik botoh. Kinerja botoh dalam mendapatkan basis suara nyatanya cukup menjanjikan bagi para kandidat calon. Sehingga secara dangkal mereka akan bekerja sama dengan botoh sebagai strategi dan upaya alternatif untuk mencapai kemenangan dalam Pilkada. Tentu saja hal ini perlu diperbaiki lagi sebelumnya, sebab sangat melanggar asas pemilu yang luber, jurdil juga mencederai citra demokrasi. Peran botoh sebagai pejudi perlu diubah dan normalisasi terhadap pebotoh pun seharusnya mulai ditinggalkan.
2. Budaya politik uang yang mengakar kuat pada masyarakat berdampak pada pemilihan umum yang tidak terlepas dari politik uang. Politik uang seolah-olah menjadi hal umum bahkan menjadi hal yang hampir wajib dilaksanakan oleh kandidat calon maupun tim kemenangannya saat akan berkompetisi dalam pemilu. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pemilu yang demokratis, dan pemahaman akan politik. Sehingga botoh disini sangat mudah untuk memanfaatkan kondisi tersebut. Jual beli suara, serangan fajar, dan pelanggaran-pelanggaran pemilu lainnya akhirnya tidak dapat terhindarkan. Kondisi seperti ini menjadi suatu hal yang urgen dan perlu untuk segera dibenahi. Namun, dalam hal ini tidak hanya para pelaku botoh yang melakukan pembenahan. Melainkan seluruh elemen yang ada pada pemilu perlu melakukan pembenahan. Agar nantinya mata rantai budaya politik uang dapat diputuskan sehingga pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat tercipta kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Prenada Media.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Pemilihan umum, klientelisme, dan negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aspinall, E., Rohman, N., Hamdi, A. Z., & Triantini, Z. E. (2017). Vote buying in Indonesia: Candidate strategies, market logic and effectiveness. *Journal of East Asian Studies*, 17(1), 1–27.
- Darry, M., & Permana, P. (2019). The role of political broker: The utilization of botoh and head of villages on 2018's general election of Tulungagung. *Proceedings of the 1st International Symposium on Indonesian Politics, SIP 2019, 26-27 June 2019, Central Java, Indonesia*.
- Hartati, A., Nafisa, A. Y., & Hidayanti, T. T. (2019). Botoh dalam Pilkada: Studi pola kerja dan transformasi botoh dalam Pilkada Kudus 2018. *Jurnal PolGov*, 1(1), 121–156.
- Kumolo, T. (2015). *Politik Hukum PILKADA Serentak*. Mizan Publika.
- Sisk, T. D., Ballington, J., Subiyanto, A., & Maxim, S. (2002). *Demokrasi di tingkat lokal: Buku panduan International IDEA mengenai keterlibatan, keterwakilan, pengelolaan konflik, dan pemerintahan*. International IDEA.

Smith, B. C. (2023). *Decentralization: The territorial dimension of the state*. Taylor & Francis.

Surbakti, R., Karim, A. G., Nugroho, K., Sujito, A., & Fitrianto, H. (2014). *Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Suyanto, B. (2005). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada Media.

